

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lansasan Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan dapat ditandai dengan adanya sebuah keadaan dimana seseorang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, pendapatan dan pendidikan yang rendah, serta keterasingan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan sosialisasi dalam kondisi sosial masyarakat. Secara singkat kemiskinan dapat di definisikan suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan materi dibandingkan standar kehidupan dari masyarakat lainnya (Suparlan, 1984:56).

Menurut *World Bank* tahun 2010, kemiskinan di definisikan sebagai hilangnya suatu kesejahteraan masyarakat (*deprivation of well being*), sedangkan permasalahan utama dari kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri, sehingga jika definisi dari kemiskinan dihubungkan dengan kesejahteraan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan penjamin kesejahteraan serta kurangnya akses sumberdaya yang digunakan sebagai media penunjang hidupnya. Kekurangan akses diartikan sebagai kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh seseorang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan atau non makanan). Badan Pusat Statistik menghitung jumlah penduduk miskin dan prosentasenya melalui hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Perhitungan jumlah penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan yang dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan makanan dan non makanan yang biasa dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan makanan adalah pengeluaran konsumsi per kapita per bulan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, pakaian, serta barang dan jasa lainnya.

Menurut Saldanha (1998) kemiskinan mempunyai enam masalah pokok didalamnya, antara lain :

1. Masalah kemiskinan merupakan masalah kerentanan. Pembangunan infrastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan pendapatan petani dalam jumlah besar yang memadai, akan tetapi kekeringan musim dua tahun berturut-turut akan menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.
2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak memberi peluang

bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan produksi yang eksploitatif yang menuntut kerja keras dalam jam kerja panjang dan imbalan rendah. Hal ini disebabkan oleh posisi tawar-menawar mereka dalam struktur hubungan produksi amat rendah dan lemah. Kemiskinan dengan demikian juga berarti hubungan dependensi kepada pemilik tanah, pimpinan proyek, elit desa, dan sebagainya.

3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, serta kekumuhan dan kekotoran.
4. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.
5. Kemiskinan ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih balita. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka sehingga didalam kompetisi merebut peluang dan sumber dalam masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

6. Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya atau dengan kata lain kemiskinan merupakan hasil dari turunan individu-individu dalam silsilah keluarga bagian atas.

2.1.1.1 Ukuran dan Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut PBB, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar menyangkut kebutuhan makanan dan kebutuhan non makanan. Kebutuhan non makanan menyangkut hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, serta rasa dihormati seperti orang lain dalam proses sosialisasi.

Menurut Nurkse 1953 dalam Mudrajat Kuncoro, (1997) ukuran sederhana dari kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2, antara lain :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang melihat keadaan seseorang dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah melihat bagaimana kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat hidup layak. Sisi yang kedua adalah melihat dari tingkat pendapatannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang menjadikan pendapatan minimum sebagai batas penentuan miskin atau tidaknya seseorang. Pembatas berupa pendapatan minimum sering disebut dengan garis kemiskinan. Menurut Sunarso dan Mardimin (1996),

kemiskinan absolut adalah suatu keadaan apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, memelihara fisik, sehingga tidak dapat bekerja secara penuh dan efisien.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang membedakan golongan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat yang berada pada presentil derajat terkecil digolongkan masyarakat miskin karena pendapatannya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat lainnya. Berdasarkan konsep seperti ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika juga terjadi perubahan pada tingkat taraf hidup masyarakat. Konsep seperti ini menjadikan kemiskinan absolut mempunyai sifat yang dinamis atau akan selalu ada. Kemiskinan absolut menjadikan mereka yang sebenarnya dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasar menjadi masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin akibat rendahnya derajat presentil pendapatannya.

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Intitute for Social Development* (UNRISD) tahun 2010 menggolongkan kebutuhan dasar manusia menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Kebutuhan fisik (gizi, perumahan, dan kesehatan).

2. Kebutuhan kultural (pendidikan, waktu luang, rekreasi, dan ketenangan hidup).
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain.

2.1.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mencerminkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas akan berimplikasi pada rendahnya pendapatan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena kebudayaan dan keturunan.
3. Kemiskinan terjadi akibat perbedaan akses dalam modal.

Adelman dan Morris dalam Arsyad (1999) mengemukakan faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan atau pertumbuhan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga presentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga-harga barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelestarian permintaan terhadap barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri, rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.1.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Arsyad (1999:240), indikator kemiskinan ada beberapa macam yakni konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, serta tingkat kesejahteraan.

1. Tingkat Konsumsi Beras

Sajogyo (1977 : 68) menggunakan tingkat konsumsi beras sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsiberas kurang dari 240 kg perkapita pertahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

2. Tingkat Pendapatan

Menurut BPS (2011), garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau bukan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Hingga Maret tahun 2011 garis kemiskinan mencapai Rp 233.740 per kapita per bulan. Sedangkan ukuran menurut *Word Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapita nya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka masuk dalam kategori miskin. Ukuran kemiskinan menurut *Word Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, menurut publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Intern Guide* disarankan 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan.

2.1.1.4 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang berkembang dan sulit diselesaikan pada tiap tahunnya. Untuk itu perlu sebuah pengukuran tentang perkembangan kemiskinan yang mencakup jumlah penduduk miskin, sebaran daerah yang miskin, serta kondisi kemiskinan secara keseluruhan. Pengukuran kemiskinan merupakan media yang digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk terus berusaha mencari kebijakan-kebijakan yang efektif guna menanggulangi masalah kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang efektif diharapkan dapat memberi evaluasi terhadap pelaksanaan suatu proyek, membandingkan kemiskinan dari waktu ke waktu, serta menentukan target terkait pengurangan jumlah penduduk miskin (*Word Bank, Introduction to Poverty Analysis, 2010*).

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive gap index*). P1 merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata kesenjangan pengeluaran

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan P2 merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.1.2 Teori Kependudukan

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Korten dalam (Kuncoro, 2010 : 118), mengartikan strategi dalam pembangunan disebut dengan *People Centered Development* atau *Putting People First*. Istilah tersebut memiliki makna bahwa tujuan utama dari suatu pembangunan tergantung dari kapasitas manusia, dimana manusia dianggap sebagai sumberdaya yang paling penting bagi sebuah pembangunan. Penduduk dianggap sebagai media penting yang menunjang terciptanya pembangunan yang signifikan. Penduduk merupakan lumbung dari terciptanya tenaga kerja, tenaga ahli, dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang efektif. Sebagai akibat dari fungsi-fungsi tersebut maka penduduk merupakan unsur yang dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi penggunaan berbagai faktor produksi.

Selanjutnya, penambahan penduduk akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai sumber permintaan yang baru. Hal ini berarti adanya penduduk dan pertambahannya akan menyebabkan terjadinya perluasan pasar dan peningkatan barang-barang produksi dalam kegiatan ekonomi. Namun, hal ini juga melihat bagaimana tingkat pendapatan yang diterima oleh penduduk, semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin tinggi

daya beli masyarakat, dan semakin tinggi daya beli masyarakat akan meluaskan pasar dan barang-barang produksi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Malthus (dalam Sukirno, 2011:449) pada mulanya ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan penduduk/tenaga kerja adalah relatif tinggi yang berarti penduduk relatif sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Pertambahan penduduk akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan begitu pun sebaliknya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan di suatu wilayah dan waktu yang tertentu. Pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan permasalahan yang serius bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sebuah wilayah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan dukungan ekonomi lain seperti penyediaan lapangan pekerjaan, baiknya fasilitas kesehatan dan maksimalnya peran pendidikan akan menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan, oleh karenanya, upaya pembatasan dan pengurangan pertumbuhan penduduk terus dilakukan, disamping itu juga dilakukan perbaikan dan penyediaan fasilitas yang menunjang peningkatan kualitas penduduk, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat sedikit demi sedikit membuat kualitas penduduk meningkat dan mengurangi permasalahan kemiskinan.

2.1.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Maier (di kutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997), jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk terhadap pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (jumlah penduduk yang tinggi) dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian memunculkan masalah sosial, seperti kemiskinan keterbelakangan dan kelaparan (Ehrlich, 1981).

Kedua, adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan teknologi institusional (Simon, dikutip dalam Thomas, et al, 2001: 1985-1986) sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsesus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun saja semakin membuat kendala bagi pembangunan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya.

Menurut Todaro (2000) bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. hal itu dibuktikan dalam perhitungan indeks Foster

Greer Thorbecke (FGT), yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

2.1.3 Teori Pendidikan

2.1.3.1 Pendidikan

Menurut Todaro (2000), pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kemampuan suatu negara. Pendidikan akan mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia dari suatu negara ataupun daerah. Pendidikan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyerap pengetahuan mengenai teknologi modern. Pendidikan juga merupakan suatu alat dan jembatan yang digunakan sebagai pengembangan kapasitas agar tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, menggambarkan pendidikan melalui angka melek huruf. Salah satu indikator terlaksananya pendidikan dengan baik untuk masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf di daerah tersebut. Indikator angka melek huruf juga dapat melambangkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dari aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka akan semakin tinggi mutu dari kualitas SDM.

UNESCO pada tahun 2010 mendefinisikan melek huruf sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan, membuat, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan

cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga seseorang tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemampuan baca tulis ini juga berkaitan dengan cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas.

2.1.3.2 Hubungan Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kualitas pendidikan yang paling dasar adalah dengan melihat angka melek huruf yang ada di suatu wilayah. Menurut Simmons (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari masalah kemiskinan, pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan seseorang untuk dapat memiliki produktivitas yang baik, produktivitas yang baik akan berdampak pada majunya teknologi modern dan pengembangan kapasitas agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang berjalan baik akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

2.1.4 Teori Kesehatan

2.1.4.1 Kesehatan

Menurut *World Health Organization* (WHO, 1948) kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, kesejahteraan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan individu dapat mencerminkan kondisi status sosial

dari individu. Kesehatan individu juga mencerminkan kesejahteraan sosial sehingga kesehatan individu dapat mencerminkan kondisi status sosial individu tersebut.

Kesehatan dapat diukur oleh beberapa kriteria, salah satu kriteria tersebut adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut BPS (2012), Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan usia manusia yang diharapkan dapat terus hidup. AHH dihitung dengan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Perhitungan AHH mengacu dari dua data yang ada, yakni Angka Lahir Hidup (ALH), dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (Standar UNDP).

Semakin tinggi tingkat AHH suatu daerah atau negara melambangkan pembangunan sosial ekonomi di suatu wilayah tersebut semakin maju. Keberhasilan program-program kesehatan dari pemerintah dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup dari penduduknya. Usia harapan hidup yang tinggi dapat menjadi modal bagi individu untuk terus mengembangkan potensi dan kualitasnya.

2.1.4.2 Hubungan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Angka harapan hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat

keajahteraan antar masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai pendapatan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan yang penting untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Salah satu faktor mendasar kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan melalui program perbaikan gizi agar menciptakan angka harapan hidup yang tinggi. Angka harapan hidup yang tinggi akan memberi dampak terhadap peningkatan produktivitas golongan miskin melalui perbaikan daya kerja, serta pengurangan hari tidak bekerja untuk meningkatkan output.

2.1.5 Teori Ketenagakerjaan

2.1.5.1 Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno (2000), yang mengikuti pengertian pengangguran secara internasional, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak

memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Orang yang diklasifikasi sebagai pengangguran jika mereka tidak memiliki pekerjaan, telah aktif mencari pekerjaan empat minggu sebelumnya dan bersedia untuk bekerja (Samuelson,2010).

2.1.5.2 Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2000), berdasarkan keadaan penyebabnya pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain :

1. Pengangguran Friksional, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang untuk meninggalkan pekerjaan lamanya dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik dan sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran Konjungtur, yaitu pengangguran yangh disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Edgar O. Edwards (1999), membagi pengangguran berdasarkan cirinya menjadi empat bagian antara lain :

1. Pengangguran Terbuka, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi akibat penambahan penawaran kerja tidak dapat mengimbangi pertumbuhan dari permintaan kerja, atau dapat diartikan mereka yang mampu dan ingin untuk bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk

mereka. Pengangguran terbuka dapat pula diartikan sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, seperti kemajuan teknologi yang mengurangi jumlah tenaga kerja, atau banyaknya industri-industri yang mengalami kemunduran.

2. Setengah Pengangguran, mereka yang sebenarnya secara nominal bekerja secara penuh namun memiliki produktifitas yang rendah sehingga pengangguran dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti dalam kegiatan produksi, biasanya mereka yang digolongkan sebagai setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja tidak secara penuh dalam seminggu.
3. Tenaga Kerja yang Lemah, adalah pengangguran yang berisi mereka-mereka yang mungkin bekerja secara penuh namun memiliki intensitas yang lemah karena buruknya kualitas fisiknya karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga Kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak menghasilkan sebuah progres dan hasil yang baik bagi dirinya ataupun bagi lembaga yang dinaunginya.

2.1.5.2 Hubungan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang bagi mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila masalah

pengangguran terjadi, masalah lain juga akan ikut timbul, masalah tersebut dapat berupa kekacauan politik yang juga akan berdampak pada memburuknya kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang.

Lincon Arsyad (1997), menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selalu berada pada golongan masyarakat yang miskin. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk dalam kelompok masyarakat menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan masyarakat yang bekerja secara penuh termasuk dalam golongan masyarakat yang kaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani tahun 2011 menyimpulkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia sangat tergantung dengan upah atau gaji yang diperoleh. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar pemasukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu lama akan menyebabkan dampak bergesernya mereka ke dalam golongan masyarakat miskin.

2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB

dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengolah sumber daya alam yang dimilinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat tergantung dengan potensi daerahnya masing-masing. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor produksi menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan PDRB setiap daerah.

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Jawa Timur (2000), mendefinisikan PDRB adalah total dari nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah (regional) tertentu dalam batas waktu tertentu dan diukur serta direkap setiap tahun. Pendekatan PDRB dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain :

1. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi (tenaga kerja, tanah, bunga modal, keuntungan) yang ikut berperan dalam suatu proses produksi di wilayah pada kurun waktu tertentu.
2. Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit atau sektor produksi di wilayah suatu daerah pada jangka waktu tertentu.
3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan komponen dari permintaan akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan juga ekspor neto.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan

PDRB suatu wilayah, baik Kota dan Kabupaten. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini umumnya, PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu berdasarkan sisi sektoral dan sisi penggunaan. Selanjutnya, PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

2.1.6.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi adalah naiknya PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui PDRB secara keseluruhan, melainkan juga melihat distribusi pendapatan dari lapisan masyarakat. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah akan berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga dan apabila pendapatan penduduk semakin terbatas banyak rumah tangga miskin yang metubah pola makannya ke hal yang lebih murah dari pola makan sebelumnya (Sadono Sukirno, 2000).

Konsentrasi penuh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argumen yang menyatakan bahwa derajat kepentingan yang rendah akan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah juga. Khususnya jika terdapat redistribusi pendapatan dari golongan kaya ke golongan miskin

Menurut *Word Bank* dalam Wahyudi (2010), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak akan memberi dampak terhadap penurunan jumlah penduduk

miskin pada wilayah atau daerah yang masih memiliki masalah dalam kesenjangan pendapatan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi memang tidak mengalami penurunan dalam siklusnya, hanya saja pertumbuhan tersebut tidak merata bagi semua lapisan golongan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2011 bertujuan untuk melihat pengaruh dari jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten atau Kota Jawa Timur. Model regresi yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan data panel dan menggunakan pendekatan efek tetap. Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, variabel PDRB berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel IPM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2.2.2 An Empirical Investigation of the of Health and Education on Distribution Property in Islamic Countries

Penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiari dan Meisami pada tahun 2009 bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 37 negara sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua variabel dependen, variabel dependen yang pertama adalah kemiskinan dan variabel dependen yang ke dua adalah distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dari kesehatan dan pendidikan akan berdampak pengurangan terhadap timpangnya pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang menurun akan berdampak pada turunnya kemiskinan.

2.2.3 Analisis Indeks Forrester Greer and Horbecke

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa naiknya angka pengangguran akan menyebabkan juga naiknya tingkat kemiskinan. Sebaliknya, semakin kecil angka pengangguran maka kemiskinan rendah pula kemiskinan yang ada di Indonesia.

2.2.4 Pengaruh PDRB, Harapan Hidup, dan Melek Huruf Terhadap Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan oleh Faturrohimin pada tahun 2011 ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari PDRB, Harapan Hidup, dan Melek Huruf terhadap tingkat Kemiskinan di Kota atau Kabupaten Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data panel dengan bantuan aplikasi eviews 6. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel melek huruf dan harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap terhadap kemiskinan.

1.2.5 Poverty Reduction Without Economic Growth

Penelitian yang dilakukan oleh Fransisco H.G. Ferreira dan Martin Ravallion *Development Research Group, Word Bank* pada tahun 2007 di negara Brazil menyimpulkan bahwa bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan, artinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada suatu daerah.

2.3 Hipotesis Dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah ada, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, jumlah pengangguran dan produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012.
2. Variabel jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, jumlah pengangguran dan produk domestik regional bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012.

2.3.2 Model Analisis

Model analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel tergantung dan variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda data panel. Model analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 POP_{it} + \beta_2 EDU_{it} + \beta_3 HEALTH_{it} + \beta_4 UNEMP_{it} + \beta_5 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

POV = Jumlah Penduduk miskin

POP = Jumlah Penduduk

EDU = Tingkat Pendidikan

HEALTH = Tingkat Kesehatan

UNEMP = Jumlah Pengangguran

PDRB = PDRB

β = Intersept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Parameter

ε = *error term*

i = Indikator daerah

t = Indikator Waktu

2.4 Kerangka Berfikir

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Timur sudah berjalan lebih baik. Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur juga merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak diantara provinsi-provinsi di Indonesia.

Tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur dari tahun ke tahun disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti juga dengan pemenuhan kebutuhan yang cepat pula, pemenuhan kebutuhan yang cepat harusnya juga diikuti dengan penyediaan dan perluasan akan lapangan pekerjaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesempatan kerja merupakan hal yang masih sangat sulit didapatkan di Jawa Timur, terbatasnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan semakin banyak angkatan kerja yang akan menganggur. Pengangguran yang terlalu lama akan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk menganalisis jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebagai variabel dependen. Variabel independen yang digunakan antara lain Jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, jumlah pengangguran, dan PDRB yang kemudian akan diuji secara statistik apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian